

BAB I

PENDAHULUAN

A . Alasan Pemilihan Judul

Kembali wilayah Indonesia diklaim oleh negara Malaysia sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Setelah lepasnya Sipadan dan Ligitan, giliran Blok Ambalat yang diklaim oleh Malaysia sebagai teritorinya. Kasus ini merupakan masalah yang sangat serius karena menyangkut keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang juga menyangkut kepentingan nasional serta harkat dan martabat sebagai jati diri sebuah bangsa. Semakin maraknya kasus-kasus serupa yang terjadi belakangan ini, merupakan implikasi dari lemahnya posisi tawar Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan negara lain.

Diplomasi sebagai ujung tombak dari pelaksanaan politik luar negeri yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia, dirasakan masih kurang tajam dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang menyangkut dengan negara lain. Masalah ini semakin banyak terjadi setelah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997, yang menyebabkan ambruknya perekonomian Indonesia, yang mana hal tersebut berdampak juga pada sendi sendi kehidupan bangsa Indonesia. Lebih fokus nya pemerintah pada masalah pemulihan ekonomi yang melanda Bangsa Indonesia pada saat krisis moneter 1997, serta tidak stabilnya kondisi politik dalam negeri pasca tumbanganya Orde Baru, menyebabkan terabaikannya masalah penjagaan terhadap wilayah wilayah Indonesia yang berada di garis terluar atau yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Wilayah

yang berada pada garis terluar atau pada perbatasan tersebut, merupakan wilayah yang harus dijaga demi keutuhan wilayah kedaulatan NKRI. Kekayaan alam yang ada pada laut atau pun pulau-pulau kecil yang berbatasan dengan negara tetangga dapat menjadi Sumber Daya Alam bagi kelancaran pembangunan di Indonesia.

TNI sebagai pilar utama dari penjagaan wilayah kedaulatan Indonesia, tidak luput dari imbas ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Berkurangnya anggaran militer menyebabkan tidak maksimal nya TNI dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak terjaganya wilayah yang menjadi kedaulatan Indonesia dapat menghambat Negara Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya, sehingga tidak optimal dalam menjalankan kebijakannya demi tercapainya kepentingan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

B . Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia pernah mengalami masa keemasannya dalam bidang Diplomasi. Sejarah telah membuktikan bahwa Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya harus melalui perjuangan Diplomasi, yang seiring sejalan dengan perjuangan mengangkat senjata. Para pemimpin TNI saat itu nampaknya menyadari bahwa perlawanan militer saja tidak akan mendatangkan kemenangan, apalagi bila diperhitungkan bahwa Belanda lebih unggul dalam hal persenjataan, organisasi dan pengalaman tempur. Perundingan dengan Belanda sejak Proklamasi kemerdekaan RI telah berperan besar dalam dunia Diplomasi Republik Indonesia. Ketika itu, Negara Indonesia telah

memenuhi syarat untuk diakui sebagai Negara, namun belum diakui oleh negara-negara anggota Liga Arab. Kebanyakan negara itu masih menunggu sampai wilayah yang dulunya bernama Nederlands Indie atau Hindia Belanda diakui oleh negeri penjajahnya yaitu negeri Belanda.¹

Peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya dan Serangan Umum 1 Maret di DIY Yogyakarta membuka dua dimensi strategik baru. Dimensi nasional nya adalah, pertempuran tersebut dan perlawanan rakyat Indonesia di beberapa wilayah lain di Indonesia, makin meningkatkan kesadaran bela negara terhadap potensi asing yang mengancam bangsa. Dimensi internasional nya adalah bahwa pertempuran pertempuran itu membuka mata dunia, bahwa Republik Indonesia yang baru saja berdiri ternyata telah sanggup mempertahankan keberadaannya, berkat keberadaan dan kemampuan angkatan bersenjata. Kemampuan ini dalam perjuangan selanjutnya selain merupakan kartu militer, juga merupakan kartu diplomasi yang cukup kuat yang dimainkan oleh pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri.² Berjalannya dua sisi perjuangan ini berhasil menghantarkan Bangsa Indonesia pada apa yang dicita-citakan pada waktu itu, yaitu Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yang diakui dan disegani oleh negara lain.

Pada masa pemerintahan Soekarno ciri *soft politics* memang dilakukan pada masa awal kemerdekaan dan ini ditunjukkan antara lain dengan adanya berbagai perjanjian perdamaian antara Indonesia dengan Belanda. Namun tetap

¹ Mohammad Roem, *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1989, Hal 3.

² Dr Hidayat Mukmin, *TNI Dalam Politik Luar Negeri, Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991. Hal 45

saja kekuatan militer pada saat itu tetap disiagakan untuk menjaga kedaulatan Negara.³ Dalam konflik dengan Belanda dalam kasus Irian Barat (sekarang Papua) di awal 1960-an, adalah kekuatan angkatan perang dan mobilisasi umum yang menjadi salah satu penentu perginya Belanda dari wilayah itu. Indonesia saat itu memiliki antara lain 1 Skuadron pesawat pengebom strategis TU-16 KS dan berbagai macam pesawat tempur Mig, mulai dari Mig 15, Mig 17, Mig 19, sampai dengan Mig 21. Saat itu peta kekuatan udara ini saja sudah merupakan alat utama sistim senjata udara yang diperhitungkan negara manapun di dunia, termasuk Negara Belanda. Sedangkan kekuatan tempur yang dimiliki oleh Angkatan Laut R.I saat itu adalah sejumlah kapal selam, kapal perusak, hingga jenis penjelajah berat yang kesemuanya dalam keadaan siap siaga dan berkemampuan penuh⁴.

Pada masa Orde Baru, Soeharto menempatkan militer sebagai bagian penting dari alat melanggengkan dan memperluas kekuasaannya. ABRI (TNI) dijadikan instrumen penting dalam menjaga setiap kebijakannya. Dengan dalih menjaga stabilitas, Soeharto memberikan banyak peran istimewa, dengan menempatkan banyak perwira di posisi-posisi penting, seperti sebagai Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati, Irjen dan lain-lain.⁵ Pemerintahan Orde Baru lebih bersifat mengamankan kepentingan internal atau dalam negeri Indonesia melalui kebijakan luar negeri yang mendukung diplomasi sebagai resolusi damai. Dengan kebijakan politik semacam ini, maka kekuatan militer dibangun menurut

³ Connie Rahakundini Bakrie M.Si, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, Hal 127

⁴ <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/21/opi02.html> diakses pada 31 Juli 2010

⁵ *Ibid*, Hal 07

perspektif tersebut. Secara keseluruhan konsentrasi pertahanan Negara pada masa Orde Baru tetap bersifat internal.

Namun masalah seolah olah mulai bermunculan secara beruntun pasca terjadinya krisis moneter yang melanda sebagian besar negara dikawasan Asia yang terjadi pada tahun 1997. Krisis moneter di kawasan Asia Timur yang menerpa Korea Selatan, Jepang, Thailand dan Indonesia pada tahun 1997, bagi Indonesia telah menjadi krisis multi-dimensional: ekonomi, sosial-politik dan keamanan. Ketimpangan konsep pembangunan yang tidak menjamin keseimbangan antara pembangunan politik dan pembangunan ekonomi, menjadikan Indonesia *collapse* yang dampaknya masih terasa hingga saat sekarang ini.

Sektor pertahanan tidak luput dari dampak yang diakibatkan oleh krisis ekonomi pada tahun 1997 tersebut. Labilnya kondisi politik dan ekonomi pasca kerusuhan Mei 1998 atau setelah lengsernya Soeharto, membuat pemerintahan lebih fokus pada usaha pemulihan ekonomi dan pemulihan situasi keamanan dalam negeri. Dapat dikatakan setelah terjadinya Krisis ekonomi atau setelah lengsernya Rezim Soeharto, ketidak stabilan situasi didalam negeri mengakibatkan terbengkalainya penjagaan terhadap wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentu sangat membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang oleh para pahlawan terdahulu telah dengan susah payah memperjuangkan dan mempertahankannya.

Terbengkalainya penjagaan terhadap wilayah yang berada pada garis terluar atau yang berbatasan dengan Negara lain, akan mengancam keutuhan wilayah

NKRI. Sebagai negara kepulauan dengan 80 % wilayah laut dan 20 % wilayah darat, ancaman terbesar terhadap kedaulatan dan wilayah Indonesia berada di laut⁶. Persentase ancaman ini menjadi semakin tinggi karena posisi geografis Indonesia berada dalam lalu lintas perdagangan dunia. Setiap hari ratusan bahkan mungkin ribuan kapal, baik kapal dagang maupun militer melintas di perairan Indonesia. Ketidakjelasan batas juga sering menimbulkan pertentangan dilapangan antara aparat yang bertugas dilapangan dengan negara tetangga. Wilayah maritim yang belum disepakati garis batas nya antara lain: (i)batas maritim antara Indonesia dengan Filipina diperairan utara dan selatan Pulau Miangas, Pulau Marore, dan Pulau Marampit, (ii)penentuan batas yang baru secara trilateral antara Indonesia-Australia-Timor Leste, termasuk masalah Pulau Batek yang diduga akan menjadi sengketa dengan Timor Leste, (iii)batas landas kontinen diwilayah antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau dore di Vietnam, (iv)batas perairan ZEE antar Indonesia dan Palau, (v)masih adanya ganjalan tentang batas laut dengan Singapura akibat reklamasi yang dilakukan oleh Singapura. Belum tercapainya kesepakatan penentuan garis batas dengan negara tetangga sangat potensial menimbulkan berbagai masalah baru dimasa yang akan datang, dan berpotensi menjadi konflik yang lebih luas dengan negara tetangga.⁷

Kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Pemerintah Malaysia yang terjadi pada masa pasca reformasi merupakan salah satu contoh bentuk dari Pemerintah Indonesia yang gagal dalam mempertahankan pulau-pulau yang

⁶ *Ibid* Hal 75

⁷ Mustafa Abu Bakar, *Menata Pulau Pulau Kecil Perbatasan, Belajar dari kasus Sipadan Ligitan dan Sebatik*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, Hal 75

menjadi wilayah kedaulatannya. Dalam kasus Sipadan dan Ligitan, Indonesia kalah dalam sidang Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, pada tahun 2002, sehingga kedua pulau terluar di utara Pulau Kalimantan itu jatuh ke tangan Malaysia⁸. Peristiwa tersebut merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, karena kedua pulau tersebut merupakan asset yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, yang jika dikelola atau dikembangkan kedua pulau tersebut dapat menjadi modal atau aset yang sangat besar dan potensial bagi pembangunan masyarakat Indonesia.

Beberapa bulan setelah kasus Sipadan dan Ligitan, persetujuan perbatasan Indonesia dan Malaysia kembali memanas dengan munculnya kasus di Blok Ambalat. Pada kawasan Blok Ambalat tersebut terjadi tumpang tindih (*overlapping*) kegiatan eksplorasi minyak antara Pertamina (Indonesia) dan Petronas (Malaysia).⁹ Bahkan Malaysia sudah dianggap terlalu jauh berpolah dengan menawarkan kawasan ini kepada perusahaan minyak multinasional, *Shell*. Tentu saja klaim sepihak oleh Malaysia tersebut mendapat reaksi keras dari Pemerintah Indonesia yang secara hukum telah sah memiliki Blok Ambalat, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perundingan-perundingan kemudian dilakukan dalam menyelesaikan sengketa kawasan Blok Ambalat, namun hingga sekarang belum juga mencapai kata sepakat antara kedua pihak. Malah pihak Malaysia semakin agresif dengan mengejar Nelayan Indonesia keluar Ambalat pada 21 Februari 2005. Sikap

⁸*Ibid Hal 83*

⁹*Ibid, Hal 2*

Malaysia tersebut semakin menambah ketegangan hubungan antara kedua negara. Kapal-kapal perang Indonesia dan Malaysia saling berhadap-hadapan di perairan tersebut. Bahkan sempat terjadi insiden penyerempetan KRI Tedong Naga yang menyerempet Kapal Rencong, milik Pasukan Diraja Malaysia, 8 April 2005. Namun dalam insiden tersebut tidak terjadi tembak-menembak. Setahun berikutnya kondisi Ambalat pelan-pelan kondusif, meski demikian kapal-kapal patroli Indonesia dan Malaysia selalu siaga di sekitar Ambalat¹⁰.

Provokasi yang dilakukan Malaysia dengan mengirim kapal-kapal perangnya melewati perairan Indonesia di kawasan Blok Ambalat tersebut, merupakan sebuah taktik Diplomasi yang menuntut Indonesia untuk sesegera mungkin membicarakan masalah Ambalat dengan negeri serumpun Melayu itu di meja perundingan atau Mahkamah Internasional. Jika Indonesia kalah dalam Diplomasi dengan Malaysia dalam penanganan sengketa Ambalat, maka nasib Blok Ambalat kemungkinan tidak akan jauh bedanya dengan Sipadan dan Ligitan yang diklaim Malaysia sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.

Jika dirunut ke belakang, sikap Malaysia yang dengan berani mengklaim kawasan Ambalat bukan hanya berdasar klaim historis, tapi juga atas dasar analisis Malaysia terhadap *performance* diplomasi Indonesia yang hampir tak pernah 'menang' melawan Malaysia pada masa pasca reformasi. Berbagai kasus pelanggaran disekitar kawasan Ambalat yang masih saja terus terjadi dan berulang ulang oleh Malaysia, merupakan bentuk kurang efektif nya Diplomasi yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia sebagai resolusi dari masalah tersebut, yang

¹⁰ <http://www.detiknews.com/read/2009/06/05/141000/1143312/159/berjuang-sendirian-di-negeri-orang> diakses pada 25 juli 2010

dijalankan pada masa Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono. Pada kasus-kasus tersebut, Pemerintah Indonesia hanya sebatas melayangkan Nota Protes atau Nota Keberatan dan klarifikasi secara diplomatik terhadap negara yang melanggar tersebut melalui Kedubes RI.

Apabila kasus ini terus terjadi, maka satu persatu wilayah atau pulau-pulau Indonesia yang berada di kawasan terluar akan hilang dan berpindah tangan satu persatu karena adanya klaim oleh negara lain. Hal ini merupakan ancaman serius terhadap keutuhan wilayah kedaulatan NKRI. Munculnya berbagai kasus tersebut menuntut adanya peranan yang lebih dari Militer Indonesia untuk mendukung berbagai upaya diplomasi yang berkaitan dengan sengketa wilayah dengan negara tetangga seperti Malaysia.

C. Rumusan Masalah

Melihat peristiwa yang ada pada Latar Belakang Masalah tersebut, penulis akan mengambil satu rumusan masalah :

“Mengapa Militer Indonesia lemah dalam menopang kekuatan Diplomasi Indonesia pada penanganan Kasus Blok Ambalat di masa Kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono?”

D. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Diplomasi

a. Definisi Diplomasi

Diplomasi yang sangat erat dihubungkan dengan hubungan antar negara adalah, seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Diplomasi adalah alat yang dipakai untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara. Diplomasi adalah alat atau instrumen utama bagi pelaksanaan politik luar negeri. Dengan kata lain, politik luar negeri adalah "*what to do*" (substansi) dan diplomasi adalah "*how to do it*".¹¹ Upaya Indonesia untuk mencapai berbagai kepentingan nasionalnya di fora internasional perlu ditopang melalui pengerahan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan diplomasi di fora global, inter-regional, regional, sub-regional, dan bilateral

Diplomasi yang sukses adalah mampu menempatkan penekanan yang benar pada setiap keadaan tertentu pada satu atau lebih instrument Diplomasi, termasuk penggunaan kekuatan militer. Kekuatan militer suatu negara biasanya selalu tampil sebagai latar belakang. Karena itu pulalah Frederick Agung berkomentar : " Diplomasi tanpa persenjataan bagaikan musik tanpa instrument

¹¹ Samendra Lal Roy, *Diplomasi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta , 1991, Hal 3

“¹² Maka untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang mengancam kepentingan nasional Indonesia, maka militer yang kuat sangat dibutuhkan untuk menguatkan posisi Indonesia dalam melakukan Diplomasi.

Merupakan sebuah kenyataan bahwa “*Negotiation from strength*” merupakan anjuran yang benar, tanpa kekuatan militer pendukung, tak satupun negara yang bisa menghindari tekanan atas kepentingan negara lainnya. Seorang tokoh Inggris yaitu John Stuart Mill mengatakan bahwa “Diplomasi kita tidak ada artinya tanpa adanya Armada Angkatan Laut untuk mendukungnya”. Dengan dukungan kapabilitas militer yang handal, diplomasi menjadi sarana jalan *pre-emptive strike* terhadap ancaman non-militer, yang bekerja melalui tampilan *deterrence effect*. Dengan demikian kekuatan diplomasi adalah harga setimpal, sehingga kapabilitas yang dibangun menjadi murah. Bagaimanapun, keefektifan diplomasi suatu negara bergantung pada sejauh mana kekuatannya. Sebaliknya sebuah negara besar dan kuat yang dilanda pertentangan sipil, ketidak stabilan pemerintah yang kronis atau kebangkrutan keuangan, dan sebagainya akan gagal untuk menimbulkan kepercayaan dari negara lain. Dalam kasus seperti itu diplomasi jarang mampu menghasilkan tujuan yang diinginkan¹³

Interaksi antara diplomasi dan perang atau pertahanan keamanan dapat dilihat dari tujuan masing masing. Baik diplomasi maupun pertahanan keamanan bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional suatu bangsa. Secara eksternal, diplomasi harus mengupayakan agar tercapai tujuan nasional suatu bangsa tanpa menimbulkan sengketa atau perang dengan bangsa lain. Diplomasi harus dapat

¹² *Ibid Hal 9*

¹³ *ibid, Hal 13.*

mencegah terjadinya instabilitas atau destabilitas interasional demi terpeliharanya perdamaian dunia. Karena apabila terjadi persengketaan, pertikaian atau perang, niscaya akan mengundang intervensi angkatan bersenjata. Selama diplomasi berlangsung, para diplomatlah yang harus tampil kedepan dan para prajurit harus berada dalam keadaan siaga.

b. Tujuan Diplomasi

Kita perlu memperhitungkan pandangan-pandangan Kautilya, seorang diplomat kawakan India kuno. Kautilya menekankan empat tujuan utama diplomasi, yaitu *acquisition* (perolehan), *preservation* (pemeliharaan), *augmentation* (penambahan), dan *proper distribution* (pembagian yang adil). Disamping itu tujuan diplomasi Kautilya juga meliputi pencapaian *Sidhhi* atau kebahagiaan. Dan selama tujuan tersebut hanya bisa diperoleh melalui pemilikan kekuatan (*power*), seorang raja harus selalu berupaya untuk menambah kekuatannya sendiri dan mengangkat kebahagiaannya. Dalam kasus seorang raja gagal untuk menambah kekuatan dan kesuksesannya, ia harus, paling tidak, berusaha mencoba mengingkari hal yang sama kepada musuhnya¹⁴.

Kautilya menyimpulkan tujuan utama diplomasi sebagai “pengamanan kepentingan negara sendiri”. Dengan kata lain, tujuan dari diplomasi yang baik atau efektif adalah *untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri*. Kepentingan terdepan tampaknya adalah *pemeliharaan keamanan*. Tetapi, selain pertimbangan yang vital tentang keamanan nasional, terdapat tujuan vital yang lain, diantaranya memajukan ekonomi, perdagangan dan kepentingan nasional,

¹⁴ *Ibid*, Hal 6

peningkatan prestise nasional, memperoleh persahabatan dengan negara lain dan sebagainya¹⁵.

Dalam penjagaan kawasan yang berada di daerah terluar kepulauan Indonesia, diharuskan adanya *acquisition* (perolehan) terhadap wilayah yang berada dikawasan terpencil tersebut. Selanjutnya pemerintah Indonesia harus melakukan *preservation*, (pemeliharaan) terhadap wilayah yang telah diperoleh secara terus menerus dengan melakukan berbagai kegiatan yang bersifat pemeliharaan atau membangun di daerah tersebut. Dengan adanya preservasi secara terus menerus di daerah yang berada di kawasan terluar tersebut, diharapkan adanya *augmentation* (penambahan), sehingga wilayah yang tadi nya tertinggal ataupun terpencil mempunyai nilai lebih yang berguna bagi sumber daya pembangunan (*proper distribution*, pembagian yang adil) bagi masyarakat Indonesia.

2. Gunboat Diplomacy

Gunboat Diplomacy merupakan salah satu bentuk Diplomasi dengan memasukkan unsur militer sebagai latar belakang dari Diplomasi. Intervensi yang dilakukan oleh militer dilakukan dengan cara menggelar atau unjuk kekuatan militer terhadap pihak lawan. Sehingga dengan adanya unjuk kekuatan yang dilakukan oleh militer diharapkan dapat mengubah kebijakan politik luar negeri suatu negara yang dituju.¹⁶

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Andrew M Dorman and Thomas G.Otte, *Military Intervention ,From Gunboat Diplomacy to Humanitarian Intervention*, Darmouth Publishing Company Limited, 1995, Hal 6

Penyebaran kapal perang mengandung maksud agar pihak lawan tidak macam-macam, singkatnya kehadiran kapal perang itu mengirim pesan jelas dan gamblang kepada pihak lawan. Kapal perang yang melaksanakan tugas diplomasi ini harus memiliki kesiapan tempur yang prima, mudah dikendalikan, memiliki mobilitas yang tinggi, memiliki kemampuan proyeksi kekuatan ke darat, serta mampu untuk menampilkan sosok angkatan laut yang kuat dan berwibawa sebagai simbol dari kekuatan, dan memiliki daya tahan operasi yang tinggi. Eksploitasi kekuatan Angkatan Laut untuk kepentingan diplomasi sebenarnya bukan hal baru. Hal itu sudah berlangsung ratusan tahun silam, dan peran itu tidak akan hilang selama di dunia masih ada Angkatan Laut. Bagaimana pun, dengan kemampuannya untuk beroperasi jauh dari negara induknya dalam waktu yang lama, Angkatan Laut senantiasa akan menjadi pilihan utama diplomasi bagi negara-negara yang paham akan karakteristik Angkatan Laut. Diplomasi tidak cukup dengan kata-kata santun para diplomat didikan Departemen Luar Negeri. Diplomasi harus didukung oleh kekuatan militer, khususnya Angkatan Laut yang merupakan salah satu instrumen diplomasi¹⁷.

Peran Dukungan Diplomasi oleh TNI AL merupakan peran yang sangat penting seperti halnya setiap angkatan laut di seluruh dunia. Peran ini dahulu dikenal sebagai Unjuk Kekuatan Angkatan Laut yang telah menjadi peran tradisional Angkatan Laut. Dukungan diplomasi adalah penggunaan kekuatan laut sebagai sarana diplomasi dalam mendukung kebijaksanaan luar negeri pemerintah, dan dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau

¹⁷ <http://damnthetorpedo.blogspot.com/2008/09/angkatan-laut-sebagai-instrumen.html> diakses pada 26 Juli 2010

beberapa negara dalam keadaan damai atau pada situasi yang bermusuhan. Secara tradisional, Angkatan Laut menunjukkan kehadirannya di laut dengan melaksanakan kunjungan kapal-kapal perang ke luar negeri untuk mengingatkan dan menunjukkan kemampuan dan kekuatannya di laut. Di samping itu juga untuk mempengaruhi pandangan negara-negara yang dikunjungi terhadap kebesaran bangsa dan mempromosikannya di dunia internasional

3. Deterrence

*“Deterrence is the process of restraining or preventing a potential attacker from committing an aggressive or hostile act by convincing him that such an act would prove to be unacceptably costly for the attacker. Deterrence is thus a much broader concept than military or nuclear deterrence. It may also be a particular factor contributing to dissuasion.”*¹⁸

Secara umum, penangkalan atau “*deterrence*” itu berarti upaya para pengambil keputusan daripada suatu bangsa atau suatu kelompok bangsa bangsa untuk menyusun himpunan alternatif bagi suatu bangsa lain atau kelompok lain bangsa bangsa dengan memperlihatkan ancaman terhadap sistem nilainya yang utama. Dengan cara demikian, kita berharap bahwa dengan mempunyai citra tersebut, lawan mungkin akan membatalkan niatnya untuk mengadakan agresi militer ke negara kita. Jadi penangkalan meliputi ancaman terhadap pihak lawan untuk menggunakan kekuatan sebagai respons guna mencegah pihak lain sejak

¹⁸ Gene Sharp, *National Security Through Civilian-Based Defense*, Harvard University, 1985, Hal 49

awal sudah menggunakan kekuatan militer. Manipulasi dengan ancaman inilah yang sebenarnya merupakan inti dari penangkalan.¹⁹

Apabila kekuatan darat, udara dan kekuatan laut atau kekuatan maritim dapat ditingkatkan berarti kekuatan penggentar (*deterrence power*) sebagai salah satu amunisi dalam bernegosiasi secara politik maupun diplomatik akan lebih kuat, dan berarti pula tujuan perdamaian akan dapat diwujudkan selain gangguan dan rongrongan terhadap kedaulatan negara yang kita cintai bersama ini akan berkurang atau hilang dengan sendirinya. Bila kita harus kembali kepada ajaran Sun Tzu '*In peace prepare for war, in war prepare for peace*', maka mungkinkah dengan kekuatan tempur yang kita miliki seadanya saat ini, Malaysia akan mundur atau mengurungkan niatnya dan mengakui kedaulatan wilayah kita hanya dengan melalui media politik atau diplomatik.

Dalam konflik dengan Belanda dalam kasus Irian Barat (sekarang Papua) di awal 1960-an, adalah kekuatan angkatan perang dan mobilisasi umum yang menjadi salah satu penentu perginya Belanda dari wilayah itu. Indonesia saat itu memiliki antara lain 1 Skuadron pesawat pengebom strategis TU-16 KS dan berbagai macam pesawat tempur Mig, mulai dari Mig 15, Mig 17, Mig 19, sampai dengan Mig 21²⁰. Saat itu peta kekuatan udara ini saja sudah merupakan alat utama sistim senjata udara yang diperhitungkan negara manapun di dunia ini, termasuk negara seperti Belanda. Sedangkan kekuatan tempur yang dimiliki oleh Angkatan Laut RI saat itu adalah sejumlah kapal selam, perusak hingga jenis

¹⁹ Laksamana Muda TNI Soewarso M.Sc, *Kumpulan Karangan Tentang Evolusi Pemikiran Masalah Keangkatan Lautan, Sesko ABRI Bagian Laut*, Jakarta, 1984, Hal 27

²⁰ *Ibid* Hal 27

penjelajah berat yang kesemuanya dalam keadaan siap-siaga dan berkemampuan penuh²¹. Sebaliknya, bagaimana dengan kekuatan militer kita saat ini dihadapkan dengan masalah Ambalat. Masih bisakah kita mempraktekkan ajaran-ajaran Sun Tzu yang dua ribu limaratus tahun yang lalu telah mengatakan bahwa *the true object of war is peace* (tujuan perang yang sebenarnya adalah damai) dan bagaimana bila memang perang kemudian tidak dapat dihindarkan

Sebenarnya dari makna tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak akan tercapai suatu perdamaian tanpa membangun kekuatan militer yang kuat, karena bila suatu pihak masih merasa dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatannya yang dianggap melebihi kekuatan lawannya, maka intimidasi dan provokasi menuju suatu perang tidak akan dapat terhindarkan. Kemampuan angkatan udara dan angkatan laut di era reformasi ini sangat memprihatinkan. Kita harus mengambil pilihan yang tepat, dalam sistem pertahanan nasional kita, karena dihadapkan dengan kondisi geopolitik dan geostrategis, dimana kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia.

4. Senjata Sebagai Instrumen Politik

Sebagai instrument politik nasional, senjata merupakan salah satu ciri penting dari beberapa instrument yang ada. Maksudnya adalah untuk mencapai atau untuk mempertahankan cita-cita suatu bangsa dengan mempengaruhi orientasi, peranan, tujuan, dan tindakan negara lain. Dengan demikian, senjata

²¹ <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0503/21/opi02.html> diakses pada 25 juli 2010

secara etis bersifat netral, dan kita harus membedakan antara cita-cita yang diwujudkan melalui penggunaan kekuatan dan instrument sendiri. Kecuali bagi para peneliti taktik, peran senjata harus lebih dipertimbangkan dalam konteks politik daripada dalam konteks kemiliteran semata-mata. Keabsahan kecaman Clausewitz atas pembedaan yang kaku antara politik dan strategi militer telah semakin jelas karena perkembangan teknologi militer telah mengubah bentuk peran dari gerakan pengalihan monarki menjadi ancaman potensial terhadap kelangsungan hidup di atas bumi. Semakin jelas bahwa adanya kekuatan militer tidak hanya untuk mengakibatkan kerusakan pada musuh, kekuatan militer itu juga dapat digunakan sebagai ancaman untuk menopang perundingan dalam diplomasi atau sebagai alat untuk mengkomunikasikan maksud seseorang kepada musuh yang potensial.²²

Dengan melihat pada kondisi Militer Indonesia saat ini, kemampuan Tentara Nasional Indonesia masih sangat memprihatinkan. Pemerintah Indonesia harus mengambil pilihan yang tepat dalam sistem pertahanan nasional, karena dihadapkan dengan kondisi geopolitik dan geostrategis, dimana Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Bila kita semua bijak terhadap rasa nasionalisme kita sendiri, maka sebenarnya secara langsung ataupun tidak, kondisi tersebut telah mengamanatkan bahwa kekuatan Tentara Nasional Indonesia harus selalu ditingkatkan. Angkatan bersenjata dapat mendukung pelaksanaan diplomasi agar diplomasi dapat bergerak lebih luwes dan lebih efektif, karena benar-benar

²² K.J.Holsti, *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*, Edisi Keempat Jilid 2, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1988, Hal 33

mempunyai kekuatan pendukung. Diplomasi tidak akan dianggap sebagai kekuatan semu atau “macan kertas” belaka, maka kekuatan militer Indonesia harus ditingkatkan sehingga berperan sebagai penunjang dalam diplomasi.

E. Hipotesa

Lemahnya Militer Indonesia dalam menopang kekuatan Diplomasi Indonesia pada penanganan kasus Ambalat dibawah kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono, terjadi karena masih lemahnya *deterrence effect* yang dimiliki oleh Militer (TNI) Indonesia terhadap Negara Malaysia.

F . Jangkauan Penelitian.

Penelitian ini akan membahas *Deterrence Effect* yang dimiliki oleh Militer Indonesia terhadap Malaysia dalam mendukung Diplomasi Indonesia pada Sengketa Blok Ambalat di masa Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

G . Metode Penelitian.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis lakukan melalui Studi Pustaka, yaitu melalui pengumpulan data dari berbagai Buku, Majalah, Internet dan Literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

I . Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini akan Penulis paparkan dalam Lima Bab :

- BAB I** : Berisikan tentang, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Tentara Nasional Indonesia, Sejarah Tebentuknya TNI, Tugas dan Peran TNI, Keterlibatan Militer (TNI) dalam Diplomasi, Pemberontakan PRRI/Permesta, Operasi Trikora, Perkembangan Militer Indonesia, Era Masa Soekarno, Era Soeharto, Era Reformasi, Masa Pemerintahan BJ Habibie, Masa Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, Masa Pemerintahan Megawati Soerkarno Putri, Masa Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono.
- BAB III** : Kasus Pelanggaran Wilayah Kedaulatan Indonesia oleh Malaysia, Sipadan dan Ligitan, Proses perundingan Sipadan dan Ligitan, Sebab lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, Ambalat, Letak dan potensi kawasan Ambalat, kronologi sengketa Ambalat, Perundingan Masalah Ambalat, Insiden Kawasan Ambalat, Tindakan dan sikap militer indonesia pada Kasus Ambalat.

- BAB IV : Lemahnya Militer Indonesia, Kondisi Alat Utama Sistem
Pertahanan Militer Indonesia, Minimnya anggaran
pertahanan, Perbandingan kekuatan Militer Indonesia dan
Malaysia, Penyelesaian Masalah.
- BAB V : Kesimpulan, Kritik dan Saran